

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur:

- Abdullah, H, Madjid. 2007. *Penataan Hukum Organisasi Perangkat Daerah Konteks Otonomi Daerah Berdasarkan Prinsip – Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik*. Makassar. PPs Universitas Hasanuddin.
- Asshiddiqie Jimly. Dalam Satya dan Ninuk Triyanti. 2009. *Memahami Hukum dari Konstitusi Sampai Implementasi*. Jakarta. Rajawali Press.
- Budiarjo, Mariam. 1982. *Dasar – dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia.
- Dault, Adyaksa. 2012. *Menghadang Negara Gagal: Ijtihad Politik, Renungan Anak Bangsa*. Jakarta. Renebook.
- Dayanto dan Asma Karim. 2015. *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teritorial dan Pedoman Pembentukannya*. Yogyakarta. CV. Budi Utama.
- Fatwa, A.M. 2009. *Potret Konstitusi Pasca Amademen UUD 1945*. Jakarta. PT. Kompas Media Nusantara.
- Gadjong, Andi Agussalim. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu.
- Handoyo, Cipto Hastu. 2008. *Prinsip - Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta. Universitas Atmajaya.
- Harsono, Boedi. 2005. *hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang – undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksananya*. Jakarta. Djambatan.
- HR, Ridwa. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. UII Press.
- HR, Syauckani. Afan, Gaffar dan M, Ryaas Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah dalam Rangka Negara Kesatuan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- M, Fauzan. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Purwokerto. STAIN.
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan
- Mertokusumo, Sudikno. 2011. *perundang-Undangan Agraria Indonesia*. Yogyakarta. Liberty.

- Moh, Mahfud, MD. 1999. *Hukum dan Pilar - Pilar Demokrasi*. Yogyakarta. Gama Media.
- Sabarno, Hari dalam Muh, Fauzan. 2002. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta. PKHKD FH Unsoed dengan UII Press.
- Santoso Urip. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta. Kencana.
- Sunindhia, Y.W. dan Ninik Widiyanti. 1987. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*. Tangerang. Bina Aksara.
- Supriadi. 2007. *Hukum Agraria*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Thalib, Dahlan. 2000. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta. Liberty.
- Widjaja, HAW. 1992. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

#### **Peraturan Perundang – Undangan:**

- Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratran Dasar Pokok – Pokok Agraria.
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.
- Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di BidangPertanahan.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional.